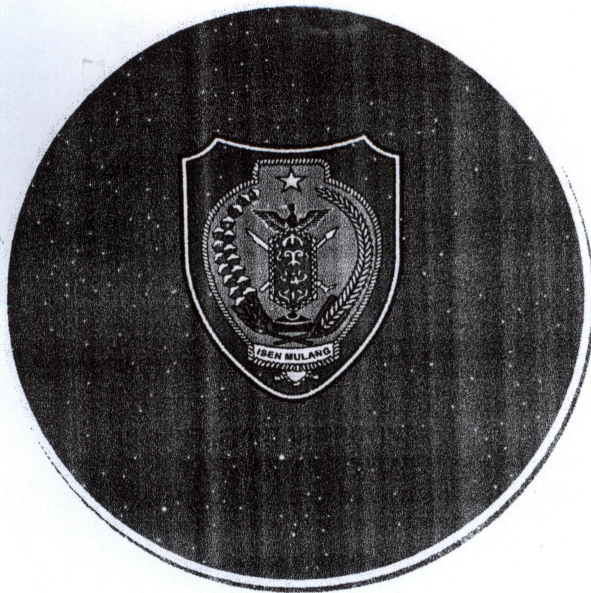
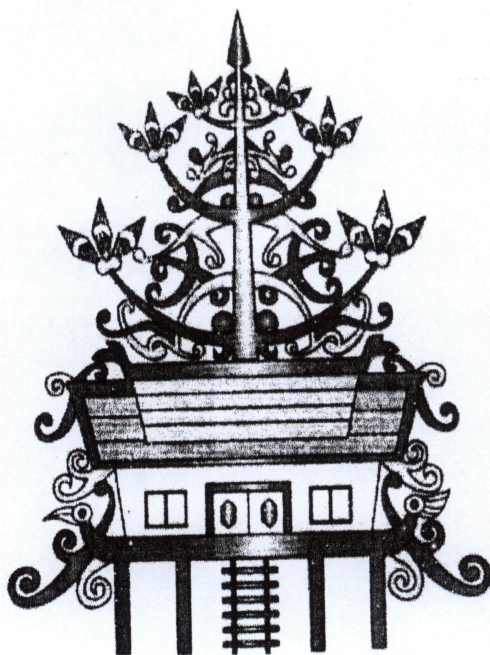




RENCANA KERJA (RENJA)

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2018**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Demi terwujudnya peningkatan pelayanan public yang baik guna mencapai target pendapatan tahun 2018, badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentunya menyusun Renja yang dapat diandalkan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, Renja ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah di pertimbangkan dengan sebaik-baiknya, sehingga sumber daya dana APBD dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Palangka Raya,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,



H. KASPINOR, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19641020 199003 1 014



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah..	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	5
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.....	6
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	8
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	11
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	11
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.....	13
3.3 Program dan Kegiatan.....	14
BAB IV PENUTUP.....	17

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Tengah
- Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Tengah
- Tabel 2.4 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018
- Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Tengah



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renja SKPD memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju tahun berikutnya.

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 secara garis besar meliputi, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Selanjutnya Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari atau sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3 Maksud dan tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif tahun 2018 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk :

1. Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Memasukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2018.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun sebelumnya.
4. Mensinergikan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sebelumnya Badan Pendapatan Daerah merupakan penggabungan dari 3 (tiga) SKPD yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan dan Biro Aset di tahun 2017. Anggaran yang tersedia berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah yang dulunya Dinas Pendapatan Daerah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Anggaran Dinas Pendapatan Daerah tahun 2016 adalah sebesar Rp.33.536.473.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.5.089.597.000,00 dari semula sebesar Rp.38.626.070.000,00 yang terdiri dari 9 program dan 54 kegiatan. Dari 54 kegiatan tersebut, terdapat 4 kegiatan yang dinolkan pada perubahan anggaran 2016 antara lain kegiatan Pengadaan Mebeleur, Pemindahan Tugas PNS, Pembinaan Tertib Administrasi Pungutan Daerah dan Rapat Evaluasi Hasil Pengendalian/Pemeriksaan. Penyerapan anggaran Dinas Pendapatan Daerah TA. 2016 yaitu sebesar Rp.30.751.233.406,06 atau 91,69% dengan penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan :
 - 1) Kegiatan Rapat Evaluasi Produk Hukum Pungutan Daerah terealisasi sebesar Rp.21.812.900,00 atau 43,63% dari anggaran sebesar Rp.50.000.000,00.
 - 2) Kegiatan Intensifikasi dan Koordinasi Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp.21.738.500,00 atau 43,48% dari anggaran sebesar Rp.50.000.000,00.

Berdasarkan target kinerja yang diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dulunya Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2016, dapat dikemukakan secara umum faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan, antara lain :

1. Lemahnya sinergitas perencanaan kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga pelaksanaan kegiatan belum memberikan hasil yang signifikan.
2. Kurangnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam kesiapan pelaksanaan kegiatan, sehingga menjadi terhambat.
3. Kurangnya kuantitas sumber daya aparatur sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada akibatnya beban tugas menjadi tidak merata.
4. Terjadinya perbaikan target dan sasaran kinerja kegiatan serta penyesuaian anggaran, sehingga masih menunggu proses penetapan perubahan anggaran.

Dari faktor-faktor yang menjadi penyebab tersebut di atas, kedepan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan upaya peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi, kebijakan penganggaran, sinkronisasi program dan kegiatan agar terciptanya perencanaan yang akurat serta pembenahan sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah baik melalui diklat dan bimtek ataupun mengusulkan penambahan aparatur sesuai dengan beban kerja yang dibutuhkan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Tengah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 terlampir.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, selaku Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai target pendapatan daerah dan melihat potensi PAD yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebelum dikeluarkannya pemisahan menjadi 2 (dua) Instansi



menjadi Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan di buat Keputusan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan Perumusan kebijakan dibidang Pendapatan Daerah sesuai dengan kebijakan Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah;
- c. melaksanakan Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan tugas bidang pendapatan daerah; dan
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan pelayanan dibidang pengelolaan Pendapatan daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh ketersediaan sumber daya aparatur sejumlah 174 (Seratus tujuh puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan yang tersebar pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 112 (Seratus dua belas) orang dan pada Kantor Induk sebanyak 62 (Enam puluh dua) orang. Selain PNS, pada Badan Pendapatan Daerah juga terdapat Tenaga Kontrak sejumlah 74 (Tujuh puluh empat) orang.

Selain didukung oleh sumber daya aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah juga didukung oleh adanya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.2 terlampir.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai koordinator tunggal Bidang Pendapatan Daerah, melalui

program dan kegiatannya khususnya program kegiatan strategis dari tahun ketahun berupaya dengan maksimal untuk melakukan tupoksinya demi tercapainya sasaran strategis yang telah ditentukan. Badan Pendapatan Daerah tetap melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) serta pemerintah kabupaten/kota khususnya dibidang peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Untuk mencapai target pendapatan daerah.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya aparaturnya yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lainnya. Teknologi saat ini telah memudahkan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh penggunanya. Memudahkan pertukaran informasi melalui dunia maya.

Penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan *clean governance* telah menciptakan perubahan-perubahan penting dalam praktek pemerintahan baik pusat maupun daerah. Perubahan tersebut diantaranya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Maka dari itu, pemerintah daerah dituntut segera menyesuaikan program dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan disegala bidang. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

- a. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk menggambarkan kewenangan dan pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang dan sub bidang.
- b. Jumlah personil dan sumber daya aparatur yang belum sebanding dengan beban kerja khususnya pada Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak mengakibatkan berkurangnya penerimaan daerah.
- d. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat dan prosedur yang terkesan berbelit-belit.
- e. Kurangnya kesadaran dari aparatur dalam memahami dan mengemban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Dampak dari kendala tersebut dapat menghambat/mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis yang telah tertuang dalam visi dan misi kepala daerah.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain :

- a. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
- b. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan pendapatan daerah.
- c. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- d. Membuat kebijakan terkait dengan perpajakan maupun penerimaan lainnya serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran membayar pajak.
- e. Mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan bagi peningkatan pendapatan daerah.
- f. Peningkatan pelayanan publik dalam pencairan dana sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana diketahui bahwa dengan ditetapkannya dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021, maka **Visi Provinsi Kalimantan Tengah**, adalah :

**" KALTENG MAJU, MANDIRI DAN ADIL UNTUK KESEJAHTERAAN
SEGENAP MASYARAKAT MENUJU KALTENG BERKAH (BERMARTABAT,
ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH DAN HARMONIS) "**

Misi :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi.
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur.
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai.
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan.
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil, dan Anti Korupsi.
6. Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata.
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tujuan :

1. Meningkatkan kesesuaian tata ruang sesuai fungsinya.
2. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas.
3. Meningkatkan pembangunan daerah pesisir dan pantai.
4. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
8. Meningkatkan peran sektor pariwisata.
9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
10. Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan.

Sasaran :

1. Terwujudnya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten.
2. Meningkatnya konektivitas antar daerah.
3. Meningkatnya kesejahteraan nelayan.
4. Meningkatnya pemerataan ekonomi masyarakat.
5. Meningkatnya daya beli masyarakat.
6. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi hijau.
7. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
8. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
9. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
10. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan.
11. Meningkatnya kualitas pendidikan.
12. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
13. Terpasarkannya destinasi wisata.
14. Menurunnya pencemaran lingkungan.
15. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah.

Dalam perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dari dokumen RPJMD utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah.

RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun ke ketiga dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Terkait hal tersebut, dengan mempedomani dokumen RPJMD, maka tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran



dokumen RPJMD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2018.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 terhadap hasil analisis kebutuhan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.3 terlampir.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sehingga Badan Pendapatan Daerah hanya melakukan tugas koordinatif sesuai dengan kewenangannya dibidang pengelolaan keuangan daerah yaitu membantu Gubernur dalam Menggali pendapatan Daerah yang ada di Wilayah Kalimantan Tengah dan mencapai target pendapatan daerah serta koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat dan Membuat kebijakan terkait dengan perpajakan maupun penerimaan lainnya serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran membayar pajak

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah yang harus disinkronisasikan dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut :

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
 - a. Pengendalian Jumlah Penduduk;
 - b. Reformasi Pembangunan Kesehatan:
 - 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (*demand and supply*);
 - 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
 - c. Reformasi Pembangunan Pendidikan;
 - d. Sinergi Percepatan.
2. Bidang Ekonomi
 - a. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;
 - b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
 - c. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
 - d. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi;
 - e. Reformasi Keuangan Negara.
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - a. Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Bidang Sarana dan Prasarana
 - a. Peningkatan Ketahanan Air;
 - b. Penguatan Konektivitas Nasional:
 - 1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah;
 - 2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi;
 - 3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.
 - c. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar:



- 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional;
 - 2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi;
 - 3) Penataan Perumahan/Permukiman.
5. Bidang Politik
 - a. Konsolidasi Demokrasi.
 6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
 - a. Percepatan Pembangunan MEF dan Alamsus POLRI dengan
 - b. Pemberdayaan Industri Pertahanan;
 - c. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.
 7. Bidang Hukum dan Aparatur
 - a. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik;
 - b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
 - a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
 - b. Pengelolaan Risiko Bencana;
 - c. Sinergi Pembangunan Perdesaan.
 9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
 - a. Perkuatan Ketahanan Pangan;
 - b. Peningkatan Ketahanan Energi;
 - c. Percepatan Pembangunan Kelautan;
 - d. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup.

Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, dengan agenda pembangunan nasional sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;



8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus mendukung tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

a. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur Badan Pendapatan Daerah yang profesional dan kredibel.
2. Memantapkan sistem pengelolaan Pendapatan daerah yang terintegrasi.
3. Memantapkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pendapatan daerah.

b. Sasaran

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan sasaran yang dikaitkan dengan target kinerja Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;



2. Terlaksananya Optimalisasi Pendapatan daerah yang semakin tahun meningkat dan selalu maksimal dalam potensi Pendapatan Daerah yang ada di wilayah Kalimantan Tengah.
3. Terlaksananya pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2018 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merencanakan akan melaksanakan sebanyak 9 (sembilan) program yang didukung oleh 55 (Lima Puluh Lima) kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 11) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 12) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 13) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 14) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 15) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 16) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - 17) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
 - 1) Kegiatan Pembangunan gedung kantor;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Meubelair;
 - 4) Kegiatan Pembangunan Tempat Parkir;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;

- 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;
 - 9) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir;
 - 10) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
 - 2) Kegiatan Pengadaan pakaian olah raga
 4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS :
 - 1) Kegiatan Pemindahan Tugas PNS.
 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
 - 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal;
 - 2) Kegiatan Bimtek/seminar/lokakarya/workshop
 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan RKA SKPD;
 - 3) Kegiatan Penyusunan LAKIP
 - 4) Penyusunan Renja SKPD
 - 5) Kegiatan Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)
 - 6) Penyusunan laporan TEPPRA/SIMPPD
 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - 1) Penyusunan rancangan peraturan tentang pajak daerah dan retribusi;
 - 2) Rapat koordinasi tim pembina SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Penunjang operasional dan koordinasi tim pembina SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 4) Sistem Informasi Manajemen SAMSAT;
 - 5) Rapat Rekon PKB BBNKB dan PAP;
 - 6) Pembinaan dan Pengendalian UPTPPD;
 - 7) Survey/Pemantauan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat;
 8. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah :
 - 1) Pengelolaan inventaris barang daerah
 9. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah :
 - 1) Kegiatan Intensifikasi dan Koordinasi PKB dan BBNKB
 - 2) Kegiatan Intensifikasi dan Koordinasi Pajak Daerah Lainnya;
 - 3) Kegiatan Intensifikasi dan Koordinasi Retribusi Daerah;



- 4) Kegiatan Intensifikasi DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak;
- 5) Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pelaporan Pendapatan Daerah;
- 6) Kegiatan Pembuatan Notice Pajak Kendaraan bermotor (Blanko SKPD);
- 7) Kegiatan Koordinasi Produk Hukum Pendapatan Daerah;
- 8) Peningkatan Pendapatan Daerah;
- 9) Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah.

Adapun anggaran yang diajukan berdasarkan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.30.040.000.000 (tiga puluh miliar empat puluh Juta Rupiah), dengan rincian program dan kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 ini merupakan dokumen rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan target pembangunan yang telah dijabarkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah juga merupakan dokumen perencanaan dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan tahun 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Selain sebagai dokumen perencanaan, Renja berfungsi pula sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 lingkup Badan Pendapatan Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD Tahun 2018.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan Badan Pendapatan Daerah, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang demi tercapainya visi dan misi serta kebijakan dan prioritas pembangunan.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Palangka Raya, Mei 2018

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,



H. KASPINOR, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19641020 199003 1 014

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama SKPD : Badan Pendapatan Daerah												
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016 (tahun lalu/n-5)				Target Program/ Kegiatan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Badan Pendapatan Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian		Tingkat Capaian (%)		
					6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12	
1					2				3			
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
4 04	07 01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	60 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	12 Bulan	30 Bulan	50%	
4 04	07 01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah paket/dokumen/surat yang terkirim	60 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	12 Bulan	30 Bulan	50%	
4 04	07 01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	25 Jenis	5 Jenis	3 Jenis	60%	5 Jenis	13 Jenis	52%	
4 04	07 01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Asuransi	10 Jenis	2 Jenis	1 Jenis	50%	2 Jenis	5 kali	50%	
4 04	07 01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya	185 Unit	37 Unit	18 Unit	49%	37 Unit	92 Unit	50%	
4 04	07 01	07	Dinas/Operasional	Pembayaran honorarium PNS dan upah non PNS	60 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	12 Bulan	30 Bulan	50%	
4 04	07 01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah rata-rata pembayaran upah petugas kebersihan kantor	60 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	12 Bulan	30 Bulan	50%	

4	04	07	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	20 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	2 Jenis	50%	4 Jenis	10 Jenis	50%	
4	04	07	01	10	Penyediaan Alat Tulis	Jumlah Alat Tulis	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	12 Bulan	30 Bulan	50%	
4	04	07	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan fotocopy	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	12 Bulan	30 Bulan	50%	
4	04	07	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kantor/UPTPPD yang membutuhkan komponen listrik	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	12 Bulan	30 Bulan	50%	
4	04	07	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan/perengkapan Kantor	20 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	2 Jenis	50%	4 Jenis	10 Jenis	50%	
4	04	07	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kantor/UPTPPD yang membutuhkan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	12 Bulan	30 Bulan	50%	
4	04	07	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kantor/UPTPPD yang membutuhkan bahan bacaan surat kabar harian	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	12 Bulan	30 Bulan	50%	
4	04	07	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kantor/UPTPPD yang membutuhkan jamuan untuk rapat/tamu kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	12 Bulan	30 Bulan	50%	
4	04	07	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Kantor/UPTPPD yang membutuhkan perjalanan dinas luar daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	12 Bulan	30 Bulan	50%	
4	04	07	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Kantor/UPTPPD yang membutuhkan perjalanan dinas dalam daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	12 Bulan	30 Bulan	50%	

[illegible]

4	04	07	04	03	Pemindahan Tugas PNS	Jumlah PNS yang pindah tugas	50 Orang	0 Orang	10 Orang	0 Orang	0%	10 Orang	10 Orang	20%	
4	04	07	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										
4	04	07	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat, bintek, kursus dan workshop	200 Orang	0 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	Orang	40 Orang	20%	
4	04	07	05	130	Bintek/Seminar/Lokakarya/ Workshop	Jumlah ASN yang mengikuti Bintek/Seminar/ Lokakarya/ Workshop	60 Orang	0 Orang	12 Orang	12 Orang	100%	12 Orang	24 Orang	40%	
4	04	07	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN										
4	04	07	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	4 Dokumen	10 Dokumen	50%	
4	04	07	06	06	Penyusunan RKA SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	35 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	3 Dokumen	43%	7 Dokumen	17 Dokumen	49%	
4	04	07	06	14	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%	
4	04	07	06	15	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	20 Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	6 Dokumen	10 Dokumen	50%	
4	04	07	06	26	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPD)	Jumlah dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	80%	
4	04	07	06	33	Penyusunan Laporan TEPRAS/SIMPPD	Jumlah laporan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%	

[illegible]

4	04	07	52	01	Pengeolaan Inventaris Barang Daerah	Jumlah inventarisasi barang milik daerah	30 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	18 Laporan	60%	
4	04	07	61		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										
4	04	07	61	01	Intensifikasi dan Koordinasi PKB dan BBNKB	Jumlah dokumen intensifikasi PKB dan BBNKB	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%	
4	04	07	61	02	Intensifikasi dan Koordinasi Pajak Daerah Lainnya	Jumlah dokumen intensifikasi pajak daerah lainnya	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%	
4	04	07	61	03	Intensifikasi dan Koordinasi Retribusi Daerah	Jumlah dokumen intensifikasi retribusi daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%	
4	04	07	61	04	Intensifikasi DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak	Jumlah dokumen intensifikasi DBH pajak dan DBH bukan pajak	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%	
4	04	07	61	05	Koordinasi dan Monitoring Pelaporan Pendapatan Daerah	Tertaksananya koordinasi monitoring pelaporan pendapatan daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%	
4	04	07	61	07	Pembuatan Notice Pajak Kendaraan bermotor (Blanko SKPD)	Tersedianya notice pembuatan kendaraan bermotor (blanko SKPD)	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%	
4	04	07	61	08	Koordinasi Produk Hukum Pendapatan Daerah	Meningkatnya koordinasi produk hukum pendapatan daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	100%	8 Dokumen	16 Dokumen	80%	
4	04	07	61	11	Peningkatan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen laporan pendapatan daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	14 Dokumen	42 Dokumen	60%	
4	04	07	61	12	Koordinasi Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyelesaian tunggakan dan sengketa pajak	70 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen			

No	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK (PP- 6/2008)	Target Rencana Badan Pendapatan Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analisis	
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
21	Jumlah kendaraan dinas/operasional			3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis							
22	Jumlah mebelur yang dipelihara			15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor							
23	Jumlah pagar, haman dan tempat parkir yang dipelihara			15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor							
24	Tersedianya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			1 Pekerja n	1 Pekerja n	1 Pekerja n	1 Pekerja n	1 Pekerja n							
25	Jumlah pakaian dinas			0 Stel 255 Stel	0 Stel 0 Stel	0 Stel 0 Stel	255 Stel 256 Stel	255 Stel 0 Stel							
26	Jumlah PNS yang pindah tugas			12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang							
27	Jumlah PNS yang mengikuti diklat, bintek, kursus dan workshop			7 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang							
28	Jumlah dokumen capaian kinerja			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen							
31	Jumlah dokumen perencanaan			7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen							
32	Jumlah dokumen LAKIP			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen							
33	Jumlah dokumen RENJA			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen							
34	Penjumlahan dokumen LPPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen							
35	Jumlah laporan TEPRASIMPDP			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen							
	Jumlah dokumen perda dan tentang pajak daerah dan retribusi daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen							
	Jumlah dokumen rakor tim pembina SAMSAT			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen							
	Jumlah dokumen operasional dan koordinasi tim pembina SAMSAT			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen							
	Jumlah dokumen informasi manajemen SAMSAT			15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen							
	Jumlah dokumen rapat rekon PKB, BBNKB dan PAP			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen							
	Jumlah dokumen pembinaan dan pengendalian UPTPPD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen							
	Jumlah dokumen survey/pemantauan pelaksanaan pelayanan masyarakat			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen							
67	Jumlah dokumen intensifikasi PKB dan BBNKB			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen							
68	Jumlah dokumen intensifikasi pajak daerah lainnya			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen							
69	Jumlah dokumen intensifikasi retribusi daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen							
70	Jumlah dokumen intensifikasi DBH pajak dan DBH bukan pajak			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen							
71	Teraksananya koordinasi dan monitoring pelaksanaan daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen							

Dihilangkan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (IP- 6/2008)	Target Renstra Badan Pendapatan Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
73	Tersedianya pembuatan notice pajak kendaraan bermotor (blanko SKPD)			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
74	Meningkatnya koordinasi produk hukum pendapatan daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
75	Jumlah dokumen laporan peningkatan daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen						
76	Jumlah dokumen penyelesaian tunggakan sangketa pajak			14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen						

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Tengah

Nama SKPD : Badan Pendapatan Daerah						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting						
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				20.593.697.250,00	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				10.572.462.000,00							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov/13 Kab/1 Kota	Tertaksananya pengiriman surat menyurat	12 Kali	232.200.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov/13 Kab/1 Kota	Tertaksananya pengiriman surat menyurat	12 Bulan	100.000.000,00							
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah paket/dokumen/surat yang terkirim	12 Kali	2.200.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah paket/dokumen/surat yang terkirim	12 Bulan	2.195.100.000,00							
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5 Jenis	319.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5 Jenis	286.500.000,00							
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah jenis asuransi	2 Jenis	79.325.000,00	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah jenis asuransi	2 Jenis	130.000.000,00							
5	Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya	37 Unit	28.000.000,00	Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya	37 Unit	30.000.000,00							
6	Penyediaan Administrasi Keuangan	Prov/13 Kab/1 Kota	Pembayaran PNS dan upah non PNS	12 Kali	8.182.224.250,00	Penyediaan Administrasi Keuangan	Prov/13 Kab/1 Kota	Pembayaran PNS dan upah non PNS	12 Bulan	2.544.910.000,00							
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah rata-rata pembayaran upah petugas kebersihan kantor	12 Kali	598.488.000,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah rata-rata pembayaran upah petugas kebersihan kantor	12 Bulan	717.952.000,00							
8	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	4 Jenis	322.000.000,00	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	4 Jenis	200.000.000,00							
9	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UP/TPPD yang membutuhkan ATK	15 Kantor	1.287.443.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UP/TPPD yang membutuhkan ATK	15 Kantor	700.000.000,00							
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah jenis barang cetakan dan fotocopy	2 Jenis	1.568.409.300,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah jenis barang cetakan dan fotocopy	2 Jenis	600.000.000,00							
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UP/TPPD yang membutuhkan komponen listrik	15 Kantor	974.807.700,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UP/TPPD yang membutuhkan komponen listrik	15 Kantor	430.000.000,00							
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang membutuhkan	6 Jenis	1.453.800.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang membutuhkan	4 Jenis	948.000.000,00							
13	Penyediaan Rumah Tangga	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UP/TPPD yang membutuhkan dan bahan kebersihan	15 Kantor	100.000.000,00	Penyediaan Rumah Tangga	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UP/TPPD yang membutuhkan dan bahan kebersihan	15 Kantor	175.000.000,00							
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UP/TPPD yang surat kabar harian	15 Kantor	93.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UP/TPPD yang surat kabar harian	15 Kantor	100.000.000,00							
15	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UP/TPPD yang rapat/tamu kantor	15 Kantor	165.000.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UP/TPPD yang rapat/tamu kantor	15 Kantor	165.000.000,00							

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	Program Kegiatan 2	Prov/13 Kota	Jumlah kantor/UPTPD yang membutuhkan perjalanan dinas luar daerah	15 Kantor	890.000.000,00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prov/13 Kota	Jumlah kantor/UPTPD yang membutuhkan perjalanan dinas luar daerah	15 Kantor	450.000.000,00	
16	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prov/13 Kota	Jumlah kantor/UPTPD yang membutuhkan perjalanan dinas luar daerah	15 Kantor	2.100.000.000,00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Prov/13 Kota	Jumlah kantor/UPTPD yang membutuhkan perjalanan dinas dalam daerah	15 Kantor	800.000.000,00	
17	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Prov/13 Kota	Jumlah kantor/UPTPD yang membutuhkan perjalanan dinas dalam daerah	15 Kantor	13.425.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				6.697.500.000,00	
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											
1	Pembangunan Gedung Kantor	Prov/13 Kota	Jumlah pekerjaan pembangunan gedung kantor	9 Pekerjaan	1.500.000.000,00					2.429.000.000,00	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prov/13 Kota	Jumlah kantor/UPTPD yang membutuhkan	15 Kantor	450.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prov/13 Kota	Jumlah kantor/UPTPD yang membutuhkan	15 Kantor	300.000.000,00	
3	Pengadaan Mebelur	Prov. Kota	Jumlah kantor yang membutuhkan pengadaan mebelur	1 Kantor	1.000.000.000,00					715.000.000,00	
4	Pengadaan Pagar dan Tempat Parkir	Prov. Kalteng	Jumlah pembangunan pagar/parkir/cek fisik/talaman	9 Pekerjaan	5.000.000.000,00					800.000.000,00	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Prov/13 Kota	Jumlah rumah dinas yang dipelihara/diperbaiki	12 Unit	165.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Prov/13 Kota	Jumlah rumah dinas yang dipelihara/diperbaiki	12 Unit	150.000.000,00	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prov/13 Kota	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	15 Kantor	1.660.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prov/13 Kota	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	15 Kantor	333.500.000,00	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prov/13 Kota	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	3 Jenis	1.000.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prov/13 Kota	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	3 Jenis	910.000.000,00	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelur	Prov/13 Kota	Jumlah mebelur yang dipelihara	15 Kantor	50.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelur	Prov/13 Kota	Jumlah mebelur yang dipelihara	15 Kantor	210.000.000,00	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir	Prov/13 Kota	Jumlah pagar, haman dan tempat parkir yang dipelihara	15 Kantor	500.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir	Prov/13 Kota	Jumlah pagar, haman dan tempat parkir yang dipelihara	15 Kantor	800.000.000,00	
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Prov/13 Kota	Tersedianya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	9 Bangunan	2.100.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Prov/13 Kota	Tersedianya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Pekerjaan	264.500.000,00	
III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR											
1	Pengadaan Pakaian Training /OlahRaga	Prov. Kalteng	Tersedianya Pakaian OlahRaga	255 Stel	115.000.000,00	Pengadaan Pakaian Training /OlahRaga	Prov. Kalteng	Tersedianya Pakaian OlahRaga	255 Stel	115.000.000,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Prov. Kalteng	Jumlah pakaian dinas	255 Stel	210.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Prov. Kalteng	Jumlah pakaian dinas	255 Stel	149.500.000,00	
IV PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS											
1	Pemindahan Tugas PNS	Prov. Kalteng	Jumlah PNS yang pindah	12 Orang	60.000.000,00	Pemindahan Tugas PNS	Prov. Kalteng	Jumlah PNS yang pindah	12 Orang	30.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
V	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				250.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				286.000.000,00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Prov. Kalteng	Jumlah pendidikan/pelatihan formal yang diikuti	40 Orang	150.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Prov. Kalteng	Jumlah PNS yang mengikuti diklat, bintek, kursus dan workshop	40 Orang	186.000.000,00	
2	Bimtek/Seminar/Lokakarya/Workshop	Prov. Kalteng	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, seminar, lokakarya dan workshop	12 Orang	100.000.000,00	Bimtek/Seminar/Lokakarya/Workshop	Prov. Kalteng	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, seminar, lokakarya dan workshop	12 Orang	100.000.000,00	
VI	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				1.490.294.843,00	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				549.956.000,00	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	4 Dokumen	588.294.843,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen capaian kinerja	4 Dokumen	9.956.000,00	
2	Penyusunan RKA SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah perencanaan dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan RKA SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah perencanaan dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	
3	Penyusunan LAKIP	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	362.000.000,00	Penyusunan LAKIP	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen LAKIP	2 Dokumen	75.000.000,00	
3	Penyusunan Renja SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen renja	2 Dokumen	75.000.000,00	Penyusunan Renja SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen renja	1 Dokumen	15.000.000,00	
4	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPD)	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen LPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPD)	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen LPD	12 Laporan	100.000.000,00	
5	Penyusunan Laporan TEPRASIMPPD	Prov. Kalteng	Jumlah laporan TEPRASIMPPD	12 Laporan	350.000.000,00	Penyusunan Laporan TEPRASIMPPD	Prov. Kalteng	Jumlah laporan TEPRASIMPPD	12 Laporan	1.592.693.500,00	
VII	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				20.997.677.000,00	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen perda dan tentang pajak daerah dan retribusi daerah	2 Dokumen	165.000.000,00	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen perda dan tentang pajak daerah dan retribusi daerah	2 Dokumen	165.000.000,00	
2	Rapat Koordinasi Tim Pembina SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen rakor tim pembina SAMSAT	1 Dokumen	259.700.000,00	Rapat Koordinasi Tim Pembina SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen rakor tim pembina SAMSAT	1 Dokumen	259.700.000,00	
3	Pembiayaan Operasional dan Koordinasi Tim Pembina SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen operasional dan koordinasi tim pembina SAMSAT	12 Dokumen	100.000.000,00	Pembiayaan Operasional dan Koordinasi Tim Pembina SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen operasional dan koordinasi tim pembina SAMSAT	12 Dokumen	138.793.500,00	
4	Sistem Informasi Manajemen SAMSAT	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen informasi manajemen SAMSAT	15 Dokumen	500.000.000,00	Sistem Informasi Manajemen SAMSAT	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen informasi manajemen SAMSAT	15 Dokumen	500.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pegawai Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	Rapat Rekon BBNKB dan PAP	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen rapat rekon PKB, BBNKB dan PAP	4 Dokumen	169.200.000,00	Rapat Rekon BBNKB dan PAP	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen rapat rekon PKB, BBNKB dan PAP	4 Dokumen	169.200.000,00		
5	Pembinaan dan Pengendalian UPTPPD	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengendalian UPTPPD	2 Dokumen	160.000.000,00	Pembinaan dan Pengendalian UPTPPD	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengendalian UPTPPD	2 Dokumen	160.000.000,00		
6	Survey/Pemantauan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen survey/pemantauan pelaksanaan pelayanan masyarakat	2 Dokumen	200.000.000,00	Survey/Pemantauan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen survey/pemantauan pelaksanaan pelayanan masyarakat	2 Dokumen	200.000.000,00		
VIII PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGLOLAAN ASET/ BARANG DAERAH						PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGLOLAAN ASET/ BARANG DAERAH						
1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah laporan inventarisasi barang	6 Laporan	100.000.000,00	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah laporan inventarisasi barang	6 Laporan	100.000.000,00	9.946.888.500,00	
IX PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGLOLAAN PENDAPATAN DAERAH						PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGLOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
1	Intensifikasi dan Koordinasi PKB dan BBNKB	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen intensifikasi PKB dan BBNKB	1 Dokumen	3.558.000.000,00	Intensifikasi dan Koordinasi PKB dan BBNKB	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah SKPD yang terkoneksi jaringan SIMDA	1 Dokumen	3.558.000.000,00		
2	Intensifikasi dan Koordinasi Pajak Daerah Lainnya	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen intensifikasi pajak daerah lainnya	1 Dokumen	400.000.000,00	Intensifikasi dan Koordinasi Pajak Daerah Lainnya	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah jenis laporan keuangan	1 Dokumen	400.000.000,00		
3	Intensifikasi dan Koordinasi Retribusi Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen intensifikasi retribusi daerah	1 Dokumen	260.000.000,00	Intensifikasi dan Koordinasi Retribusi Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah jenis laporan posisi kas daerah	1 Dokumen	260.000.000,00		
4	Intensifikasi DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen intensifikasi DBH pajak dan DBH bukan pajak	1 Dokumen	590.000.000,00	Intensifikasi DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah jenis laporan pengelolaan gaji PNS Pemprov Kalteng	1 Dokumen	590.000.000,00		
5	Koordinasi dan Monitoring Pelaporan Pendapatan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota	Tertaksananya koordinasi dan monitoring pelaporan pendapatan daerah	1 Dokumen	550.000.000,00	Koordinasi dan Monitoring Pelaporan Pendapatan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota	Tertaksananya pengelolaan keuangan	1 Dokumen	550.000.000,00		
6	Pembuatan Notice Pajak Kendaraan bermotor (Blanko SKPD)	Prov/13 Kab/1 Kota	Tersedianya pembuatan notice pajak kendaraan bermotor (blanko SKPD)	1 Dokumen	900.000.000,00	Pembuatan Notice Pajak Kendaraan bermotor (Blanko SKPD)	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah Keputusan Gubernur tentang hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota	1 Dokumen	900.000.000,00		
7	Koordinasi Produk Hukum Pendapatan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota	Meningkatnya koordinasi produk hukum pendapatan daerah	1 Dokumen	360.000.000,00	Koordinasi Produk Hukum Pendapatan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah SKPD yang mengikuti asistensi penyusunan laporan keuangan	4 Dokumen	360.000.000,00		
8	Peningkatan Pendapatan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen Laporan Pendapatan Daerah	4 Dokumen	3.003.888.500,00	Peningkatan Pendapatan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen tunggakan dan sangketa pajak	14 Dokumen	3.003.888.500,00		
9	Jumlah	Prov/13 Kab/1 Kota			66.863.557.593,00	Koordinasi Penyelesaian Tunggakan dan Sangketa Pajak	Prov/13 Kab/1 Kota			30.040.000.000,00		

Tabel 2.4
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

Nama SKPD : Badan Pendapatan Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov/13 Kab/1 Kota	Terlaksananya pengiriman surat menyurat	12 Bulan	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah rata-rata paket/dokumen/surat yang terkirim	12 Bulan	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5 Jenis	
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah jenis asuransi	2 Jenis	
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya	37 Unit	
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prov/13 Kab/1 Kota	Pembayaran honorarium PNS dan upah non PNS	12 Bulan	
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah rata-rata pembayaran upah petugas kebersihan kantor	12 Bulan	
8	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	4 Jenis	
9	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan ATK	15 Kantor	
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah jenis barang cetakan dan fotocopy	2 Jenis	
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan komponen listrik	15 Kantor	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kalteng	Jumlah jenis peralatan /perlengkapan kantor	4 Jenis	
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 Kantor	
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan bahan bacaan surat kabar harian	15 Kantor	
15	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan jamuan untuk rapat/tamu kantor	15 Kantor	
16	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan perjalanan dinas luar daerah	15 Kantor	
17	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan perjalanan dinas dalam daerah	15 Kantor	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Gdeung Kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	15 Kantor	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kantor/UPTD yang membutuhkan	15 Kantor	
3	Pengadaan Mubelair	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah jenis pengadaan meubelair	4 Jenis	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah rumah dinas yang dipelihara/diperbaiki	12 Unit	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	15 Kantor	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah kendaraan dinas/operasional	3 Jenis	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah mebeleur yang dipelihara	15 Kantor	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah pagar, haman dan tempat parkir yang dipelihara	15 Kantor	
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kab. Seruyan	Tersedianya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	4 Pekerjaan	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Prov. Kalteng	Jumlah pakaian dinas	255 Stel	
2	Pengadaan Pakaian Olahraga	Prov. Kalteng	Jumlah Pakaian olah raga	255 Stel	
IV	PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS				
1	Pemindahan Tugas PNS	Prov. Kalteng	Jumlah PNS yang pindah tugas	12 Orang	
V	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Prov. Kalteng	Jumlah PNS yang mengikuti diklat, bimtek Pelatihan Formal	40 Orang	
2	Bimtek/Seminar/Lokakarya/Workshop	Prov. Kalteng	Jumlah PNS yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan workshop	12 Orang	
VI	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen capaian kinerja	4 Dokumen	
2	Penyusunan RKA SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen renja SKPD	7 Dokumen	
2	Penyusunan LAKIP	Prov. Kalteng	Tersedianya Dokumen LAKIP	1 Dokumen	
3	Penyusunan RENJA SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen renja SKPD	2 Dokumen	
4	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen LPPD	1 Dokumen	
5	Penyusunan Laporan TEPRA/SIMPPD	Prov. Kalteng	Jumlah Laporan TEPRA/SIMPPD	12 Dokumen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
VII	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen Perda dan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2 Dokumen	
2	Rapat Koordinasi Tim Pembina SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen rakor tim pembina SAMSAT	1 Dokumen	
3	Penunjang Operasional dan Koordinasi Tim Pembina SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen operasional dan kordinasi tim pembina SAMSAT	12 Dokumen	
4	Sistem Informasi Manajemen SAMSAT	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen informasi manajemen SAMSAT	15 Dokumen	
5	Rapat Rekon BBNKB dan PAP	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen rapat rekon PKB, BBNKB dan PAP	4 Dokumen	
6	Pembinaan dan Pengendalian UPTPPD	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengendalian UPTPPD	2 Dokumen	
7	Survey/Pemantauan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen survey/pemantauan pelaksanaan pelayanan masyarakat	2 Dokumen	
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET/ BARANG DAERAH				
1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah laporan inventarisasi barang	6 Laporan	
IX	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
1	Intensifikasi dan Koordinasi PKB dan BBNKB	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen intensifikasi PKB dan BBNKB	1 Dokumen	
2	Intensifikasi dan Koordinasi Pajak Daerah Lainnya	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen intensifikasi pajak daerah lainnya	1 Dokumen	
3	Intensifikasi dan Koordinasi Retribusi Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen intensifikasi retribusi daerah	1 Dokumen	
4	Intensifikasi DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen intensifikasi DBH pajak dan DBH bukan pajak	1 Dokumen	
5	Koordinasi dan Monitoring Pelaporan Pendapatan Daerah	Prov. Kalteng	Terlaksananya koordinasi dan monitoring pelaporan pendapatan daerah	1 Dokumen	
6	Pembuatan Notice Pajak Kendaraan bermotor (Blanko SKPD)	Prov/13 Kab/1 Kota	Tersedianya pembuatan notice pajak kendaraan bermotor (blanko SKPD)	1 Dokumen	
7	Koordinasi Produk Hukum Pendapatan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota	Meningkatnya koordinasi produk hukum pendapatan daerah	1 Dokumen	
8	Peningkatan Pendapatan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen Laporan Pendapatan Daerah	4 Dokumen	
9	Koordinasi Penyelesaian Tunggakan dan Sangketa Pajak	Prov/13 Kab/1 Kota	Jumlah dokumen tunggakan dan sangketa pajak	14 Dokumen	

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Tengah

Nama SKPD : Badan Pendapatan Daerah				Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana tahun 2019	
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 04 07 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				10.821.886.500,00				11.585.000.000,00
4 04 07 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat menyurat	Prov/13 Kab/1 Kota	12 Bulan	100.000.000,00	APBD		12 Kali	150.000.000,00
4 04 07 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah rata-rata paket/dokumen/surat yang terkirim	Prov/13 Kab/1 Kota	12 Bulan	2.195.100.000,00	APBD		12 Kali	2.200.000.000,00
4 04 07 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Prov/13 Kab/1 Kota	5 Jenis	286.500.000,00	APBD		5 Jenis	300.000.000,00
4 04 07 01 05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah jenis asuransi	Prov/13 Kab/1 Kota	2 Jenis	130.000.000,00	APBD		2 Jenis	150.000.000,00
4 04 07 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya	Prov/13 Kab/1 Kota	37 Unit	30.000.000,00	APBD		37 Unit	35.000.000,00
4 04 07 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honorarium PNS dan upah non PNS	Prov/13 Kab/1 Kota	12 Bulan	2.512.084.500,00	APBD		12 Kali	2.600.000.000,00
4 04 07 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah rata-rata pembayaran upah petugas kebersihan kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	12 Bulan	717.952.000,00	APBD		12 Kali	750.000.000,00
4 04 07 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	Prov/13 Kab/1 Kota	4 Jenis	200.000.000,00	APBD		4 Jenis	250.000.000,00
4 04 07 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan ATK	Prov/13 Kab/1 Kota	15 Kantor	700.000.000,00	APBD		15 Kantor	750.000.000,00
4 04 07 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan fotocopy	Prov/13 Kab/1 Kota	2 Jenis	600.000.000,00	APBD		2 Jenis	620.000.000,00
4 04 07 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan komponen listrik	Prov/13 Kab/1 Kota	15 Kantor	430.000.000,00	APBD		15 Kantor	500.000.000,00
4 04 07 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan /perlengkapan kantor	Prov. Kalteng	4 Jenis	1.100.000.000,00	APBD		4 Jenis	1.300.000.000,00

4	04	07	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kantor/UPTPD yang membutuhkan peralatan kebersihan dan bahan	Prov/13 Kab/1 Kota	15 Kantor	175.000.000,00	APBD		15 Kantor	200.000.000,00
4	04	07	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kantor/UPTPD yang membutuhkan bahan bacaan surat kabar harian	Prov/13 Kab/1 Kota	15 Kantor	100.000.000,00	APBD		15 Kantor	100.000.000,00
4	04	07	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kantor/UPTPD yang membutuhkan jamuan untuk rapat/tamu kantor	Prov/13 Kab/1 Kota	15 Kantor	165.000.000,00	APBD		15 Kantor	200.000.000,00
4	04	07	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kantor/UPTPD yang membutuhkan perjalanan dinas luar daerah	Prov/13 Kab/1 Kota	15 Kantor	515.125.000,00	APBD		15 Kantor	580.000.000,00
4	04	07	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah kantor/UPTPD yang membutuhkan perjalanan dinas dalam daerah	Prov/13 Kab/1 Kota	15 Kantor	865.125.000,00	APBD		15 Kantor	900.000.000,00
									6.697.500.000,00				10.068.000.000,00
4	04	07	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								
4	04	07	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah kantor/UPTPD yang membutuhkan	Prov/13 Kab/1 Kota	15 Kantor	2.429.000.000,00	APBD		15 Kantor	1.400.000.000,00
				05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2	Prov/13 Kab/1 Kota	0 Unit		APBD		7 R4/17 R2	3.733.000.000,00
4	04	07	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah kantor/UPTPD yang membutuhkan	Prov/13 Kab/1 Kota	15 Kantor	300.000.000,00	APBD		15 Kantor	350.000.000,00
4	04	07	02	10	Pengadaan Meubelair	Jumlah kantor/UPTPD yang membutuhkan	Prov/13 Kab/1 Kota	15 Kantor	715.000.000,00	APBD		12 Unit	715.000.000,00
4	04	07	02	13	Pembangunan Pagar dan tempat parkir	Jumlah kantor/UPTPD yang membutuhkan	Prov/13 Kab/1 Kota	15 Kantor	800.000.000,00	APBD		12 Unit	800.000.000,00
4	04	07	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara/diperbaiki	Prov/13 Kab/1 Kota	15 Kantor	150.000.000,00	APBD		12 Unit	150.000.000,00
4	04	07	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Prov/13 Kab/1 Kota	15 Kantor	333.500.000,00	APBD		15 Kantor	350.000.000,00
4	04	07	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Prov/13 Kab/1 Kota	3 Jenis	910.000.000,00	APBD		3 Jenis	910.000.000,00
4	04	07	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelur	Jumlah mebelur yang dipelihara	Prov/13 Kab/1 Kota	15 Kantor	50.000.000,00	APBD		15 Kantor	50.000.000,00
4	04	07	02	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir	Jumlah pagar, haman dan tempat parkir yang dipelihara	Prov/13 Kab/1 Kota	15 Kantor	210.000.000,00	APBD		15 Kantor	210.000.000,00

4	04	07	02	141	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kab. Seruyan	1 Pekerjaan	800.000.000,00	APBD		1 Pekerjaan	1.400.000.000,00
4	04	07	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				293.250.000,00				165.750.000,00
4	04	07	03	01	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah pakaian olahraga	Prov. Kalteng	255 Stel	127.500.000,00	APBD		255 Stel	-
4	04	07	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	Prov. Kalteng	255 Stel	165.750.000,00	APBD		255 Stel	165.750.000,00
4	04	07	04		PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS				30.000.000,00				30.000.000,00
4	04	07	04	03	Pemindahan Tugas PNS	Jumlah PNS yang pindah tugas	Prov. Kalteng	10 Orang	30.000.000,00	APBD		10 Orang	30.000.000,00
4	04	07	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				286.000.000,00				350.000.000,00
4	04	07	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat, bintek, kursus dan workshop	Prov. Kalteng	40 Orang	186.000.000,00	APBD		40 Orang	200.000.000,00
4	04	07	05	130	Bintek/Seminar/Lokakarya/Wor kshop	Jumlah ASN yang mengikuti Bintek/Seminar/Kursus/Lokakar ya/Workshop	Prov. Kalteng	12 Orang	100.000.000,00	APBD		12 Orang	150.000.000,00
4	04	07	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN				310.575.000,00				369.956.000,00
4	04	07	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	Prov. Kalteng	4 Dokumen	9.956.000,00	APBD		4 Dokumen	9.956.000,00
4	04	07	06	06	Penyusunan RKA SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	Prov. Kalteng	4 Dokumen	100.000.000,00	APBD		4 Dokumen	120.000.000,00
4	04	07	06	14	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen perencanaan	Prov. Kalteng	1 Dokumen	10.619.000,00	APBD		1 Dokumen	15.000.000,00
4	04	07	06	15	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	Prov. Kalteng	4 Dokumen	75.000.000,00	APBD		4 Dokumen	85.000.000,00
4	04	07	06	26	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)	Jumlah dokumen	Prov. Kalteng	1 Dokumen	15.000.000,00	APBD		1 Dokumen	20.000.000,00
4	04	07	06	33	Penyusunan laporan TEPRAS/SIMPPD	Jumlah laporan	Prov. Kalteng	12 laporan	100.000.000,00	APBD		12 Laporan	120.000.000,00
4	04	07	17		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				1.553.900.000,00				1.760.000.000,00

4	04	07	17	05	Penyusunan rancangan peraturan tentang pajak daerah dan retribusi	Jumlah dokumen perda tentang rancangan peraturan tentang pajak daerah dan retribusi	Prov. Kalteng	1 Perda	165.000.000,00	APBD		1 Perda	185.000.000,00
4	04	07	17	22	Rapat koordinasi tim pembina SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen rakor tim pembina SAMSAT	Prov. Kalteng	1 Dokumen	259.700.000,00	APBD		1 Dokumen	275.000.000,00
4	04	07	17	23	Penunjang operasional dan koordinasi tim pembina SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen operasional dan koordinasi tim pembina SAMSAT	Prov. Kalteng	12 Dokumen	100.000.000,00	APBD		12 Dokumen	150.000.000,00
4	04	07	17	34	Sistem Informasi Manajemen SAMSAT	Jumlah dokumen pengembangan SIM SAMSAT	Prov. Kalteng	15 Dokumen	500.000.000,00	APBD		15 Dokumen	500.000.000,00
4	04	07	17	69	Rapat Rekon PKB BBNKB dan PAP	Jumlah dokumen Rekon PKB BBNKB dan PAP	Prov. Kalteng	4 Dokumen	169.200.000,00	APBD		4 Dokumen	200.000.000,00
4	04	07	17	71	Pembinaan dan Pengendalian UPTPPD	Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengendalian UPTPPD	Prov. Kalteng	2 Dokumen	160.000.000,00	APBD		2 Dokumen	200.000.000,00
4	04	07	17	73	Survey/Pemantauan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat	Jumlah dokumen Survey/Pemantauan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat	Prov. Kalteng	2 Dokumen	200.000.000,00	APBD		2 Dokumen	250.000.000,00
4	4	07	52		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGLOLAAN ASET/ BARANG DAERAH	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah	Prov. Kalteng	6 Laporan	100.000.000,00	APBD		6 Laporan	125.000.000,00
4	4	07	61		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGLOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah dokumen intensifikasi PKB dan BBNKB	Prov. Kalteng	3 Dokumen	3.558.000.000,00	APBD		3 Dokumen	3.700.000.000,00
4	4	07	61	01	Intensifikasi dan Koordinasi PKB dan BBNKB	Jumlah dokumen intensifikasi pajak daerah lainnya	Prov. Kalteng	3 Dokumen	400.000.000,00	APBD		3 Dokumen	450.000.000,00
4	4	07	61	02	Intensifikasi dan Koordinasi Pajak Daerah Lainnya	Jumlah dokumen intensifikasi retribusi daerah	Prov. Kalteng	4 Dokumen	260.000.000,00	APBD		4 Dokumen	280.000.000,00
4	4	07	61	03	Retribusi Daerah	Jumlah dokumen intensifikasi DBH pajak dan DBH bukan pajak	Prov. Kalteng	1 Dokumen	590.000.000,00	APBD		1 Dokumen	650.000.000,00
4	4	07	61	04	Intensifikasi DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak	Jumlah dokumen intensifikasi DBH pajak dan DBH bukan pajak	Prov. Kalteng	1 Dokumen	550.000.000,00	APBD		1 Dokumen	650.000.000,00
4	4	07	61	05	Koordinasi dan Monitoring Pelaporan Pendapatan Daerah	Tertaksananya koordinasi dan monitoring pelaporan pendapatan daerah	Prov. Kalteng	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	

4	4	07	61	07	Pembuatan Notice Pajak Kendaraan bermotor (Blanko SKPD)	Tersedianya pembuatan notice pajak kendaraan bermotor (blanko SKPD)	Prov/13 Kab/1 Kota	1 Dokumen	900.000.000,00	APBD		1 Dokumen	950.000.000,00
4	4	07	61	08	Koordinasi Produk Hukum Pendapatan Daerah	Meningkatnya koordinasi produk hukum pendapatan daerah	Prov. Kalteng	1 Dokumen	360.000.000,00	APBD		1 Dokumen	380.000.000,00
4	4	07	61	11	Peningkatan Pendapatan Daerah	Jumlah Peningkatan Pendapatan Daerah	Prov. Kalteng	4 Dokumen	3.003.888.500,00	APBD		4 Dokumen	3.400.000.000,00
4	4	07	61	12	Koordinasi Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah	Jumlah dokumen Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota	14 Dokumen	325.000.000,00	APBD		14 Dokumen	350.000.000,00
					JUMLAH				30.040.000.000,00				35.263.706.000,00